

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KOTA TEGAL TAHUN 2022

Bab ini akan menjelaskan kondisi terkini Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Tegal pada tahun 2022, dengan fokus pada hasil implementasi SPBE Kota Tegal tahun tersebut dan sasaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada tahun 2023. Administrasi publik di era digital modern telah mencapai titik balik dengan diluncurkannya SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Layanan publik yang lebih efektif, terbuka, dan responsif dapat terwujud berkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh pemerintahan oleh SPBE..

2.1 Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kota Tegal Tahun 2022

Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah secara konsisten dilaksanakan setiap tahunnya sejak tahun 2018. Melalui kegiatan ini, status terkini dari implementasi SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) dapat diukur dengan lebih akurat. Hasil dari pemantauan ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai kemajuan yang telah dicapai, tetapi juga memungkinkan setiap IPPD untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Selain itu, dampak yang diharapkan dari proses ini adalah meningkatnya daya saing di antara IPPD. Dengan status implementasi SPBE yang terukur, setiap instansi diharapkan dapat bersaing secara inovatif dalam

meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE di lingkup mereka. Kompetisi ini akan mendorong IPPD untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sehingga kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat semakin optimal. Kota Tegal, seperti halnya IPPD lainnya, berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas SPBE melalui pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan.

Pembentukan dan pengoperasian sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) melibatkan berbagai aktor kunci yang berperan dalam berbagai aspek pengembangan, implementasi, dan operasionalisasi. Salah satu aktor utama dalam proses ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Diskominfo bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan *e-government*, memastikan bahwa setiap inisiatif dan program terkait berjalan sesuai rencana dan terintegrasi dengan baik di seluruh instansi pemerintah. Mereka juga berperan dalam sosialisasi dan pelatihan kepada pegawai pemerintah agar mampu memanfaatkan teknologi informasi dengan efektif.

Pembentukan dan pengoperasian sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) melibatkan berbagai aktor kunci yang berperan dalam berbagai aspek pengembangan, implementasi, dan operasionalisasi. Dinas Komunikasi dan Informasi memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas komunikasi dan penyediaan informasi dalam lingkup pemerintahan, mereka memiliki peran yang luas dan strategis dalam mendukung implementasi dan pengembangan *e-government*. Dinas Komunikasi dan Informasi

bertanggung jawab atas penyediaan infrastruktur komunikasi yang mendukung operasional *e-government*, memastikan ketersediaan dan keandalan infrastruktur seperti jaringan internet, layanan telekomunikasi, dan infrastruktur teknologi informasi lainnya yang diperlukan untuk menjalankan sistem *e-government* secara efektif. Berikut susunan keanggotaan tim pengarah koordinasi SPBE Kota Tegal :

Tabel 2.1
Susunan Keanggotaan Tim Teknis Koordinasi SPBE Kota Tegal

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Bidang Tata Kelola Ketua e-Government dan Pengembangan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Infrastruktur Informatika dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika KotaTegal	Anggota
4.	Kepala Seksi Tata Kelola e-Government Dinas Komunikasi dan InformatikaKotaTegal	Anggota
5.	Kepala Seksi Infrastruktur Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal	Anggota
6.	Kepala Subbidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah KotaTegal	Anggota
7.	Kepala Subbidang Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah KotaTega	Anggota
8.	Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah KotaTegal	Anggota
9.	Kepala Subbidang Informasi dan Layanan Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah KotaTegal	Anggota
10.	Kepala Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Sekretariat Daerah KotaTegal	Anggota
11.	Kepala Subbagian Tata Laksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah KotaTegal	Anggota
12.	Pranata Komputer Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah KotaTegal	Anggota
13.	Pranata Komputer Inspektorat Kota Tegal	Anggota

14.	Pranata Komputer Badan Keuangan Daerah Kota Tegal	Anggota
15.	Pranata Komputer Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal	Anggota
16.	4 Orang Pranata Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal	Anggota
17.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal	Anggota
18.	Staf Dinas Kesehatan Kota Tegal	Anggota
19.	Staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tegal	Anggota

Sumber : Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 555/048.3/2019

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa Diskominfo memainkan peran penting dalam menyediakan *platform* dan layanan *e-government* kepada masyarakat. Mengembangkan dan mengelola portal pemerintah digital yang menyediakan akses terhadap berbagai layanan publik secara online, mulai dari pembayaran pajak dan izin usaha hingga layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian, Dinas Komunikasi dan Informasi menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan layanan publik. Dinas Komunikasi dan Informasi juga bertanggung jawab atas pengelolaan informasi dan data pemerintah yang tersedia dalam sistem *e-government*. Diskominfo mengembangkan kebijakan dan standar terkait dengan pengelolaan dan perlindungan data, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi dan keamanan informasi. Dengan demikian diskominfo berperan dalam menjaga integritas, keamanan, dan kerahasiaan informasi pemerintah yang disimpan dan diakses melalui sistem *e-government*.

Selain fungsi-fungsi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informasi juga turut berperan dalam menyediakan pelatihan dan dukungan teknis kepada instansi pemerintah dalam penggunaan sistem *e-government*. Mereka memberikan

pelatihan kepada pegawai pemerintah tentang cara menggunakan dan mengelola sistem *e-government* dengan efektif, serta memberikan dukungan teknis dalam mengatasi masalah teknis yang mungkin timbul dalam pengoperasian sistem tersebut. Secara keseluruhan, Dinas Komunikasi dan Informasi memainkan peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dengan menyediakan infrastruktur, *platform*, dan layanan yang dibutuhkan, serta mengelola informasi dan data dengan baik, mereka membantu mewujudkan visi pemerintah daerah, transparan, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi yang optimal.

Selain itu adanya keterlibatan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) juga memiliki peran penting dalam perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Bapperida bertugas untuk merumuskan strategi dan rencana kerja jangka panjang dan menengah yang mengakomodasi kebutuhan serta potensi penerapan SPBE. Dalam konteks ini, Bappeda memastikan bahwa pengembangan *e-government* selaras dengan visi pembangunan daerah dan mampu meningkatkan efisiensi serta kualitas pelayanan publik. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan pembangunan di tingkat daerah, Bappeda memiliki dampak yang signifikan dalam transformasi menuju pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Bapperida berperan dalam merumuskan kebijakan dan strategi terkait dengan implementasi *e-government* di tingkat daerah yaitu mempertimbangkan

kebutuhan dan tantangan lokal dalam mengembangkan rencana aksi yang sesuai untuk memajukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu menjalankan peran koordinatif dalam mengoordinasikan berbagai instansi dan unit kerja pemerintah yang terlibat dalam implementasi *e-government*, serta memfasilitasi kolaborasi antarinstansi untuk memastikan keselarasan dan sinergi dalam pengembangan dan operasionalisasi sistem *e-government*.

Bapperida bertugas untuk mengembangkan rencana pembangunan *e-government* yang berkelanjutan dan terarah. Merancang langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk mengimplementasikan inisiatif *e-government*, termasuk alokasi sumber daya, pengembangan infrastruktur, dan pelaksanaan program-program pelatihan. Selain itu Bapperida mengadakan proses konsultasi publik dan melibatkan masyarakat dalam pengembangan sistem *e-government*. Bapperida memperhitungkan masukan dan umpan balik dari masyarakat untuk memastikan bahwa desain sistem *e-government* mencerminkan kebutuhan dan harapan mereka.

Dengan peran yang komprehensif ini, Bapperida berkontribusi secara signifikan dalam menggerakkan transformasi menuju pemerintahan yang lebih efisien, terbuka, dan responsif melalui penggunaan teknologi informasi. Oleh karena itu melalui perencanaan yang matang, koordinasi yang efektif, dan evaluasi yang terus-menerus, Bapperida membantu memastikan bahwa implementasi *e-government* di tingkat daerah berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Sedangkan pada sisi pengawasan atas keberjalanan SPBE menjadi tanggung jawab Inspektorat. Inspektorat berperan sebagai pengawas dan auditor internal yang memastikan bahwa implementasi SPBE dilakukan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Inspektorat melakukan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin muncul, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi sistem. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan penyalahgunaan wewenang dan ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat diminimalisir. Inspektorat merupakan ujung tombak dalam memastikan keselarasan, keberlanjutan, dan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dalam era transformasi digital, inspektorat memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan akuntabel.

Sebagai garda terdepan, inspektorat bertugas untuk mengawasi dan mengaudit pelaksanaan *e-government*. Mereka memeriksa sejauh mana sistem tersebut berfungsi sesuai dengan standar, kebijakan, dan regulasi yang berlaku. Audit tersebut meliputi aspek keamanan data, transparansi informasi, dan kepatuhan terhadap aturan privasi. Dengan demikian, inspektorat memainkan peran vital dalam menjamin bahwa integritas dan keamanan data publik tetap terjaga dalam lingkungan digital yang rentan terhadap ancaman *cyber*. Selain itu, inspektorat juga berperan sebagai agen penyelidik dalam kasus dugaan penyalahgunaan atau pelanggaran yang terkait dengan *e-government* yaitu melakukan penyelidikan mendalam untuk menemukan pelanggaran, menangani

insiden keamanan, dan memberikan rekomendasi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Dengan demikian, inspektorat menjadi penjaga integritas dan keadilan dalam penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan.

Selanjutnya inspektorat berkontribusi dalam pengembangan kebijakan terkait dengan *e-government* dengan memberikan masukan yang berharga dalam merumuskan kebijakan yang memperkuat keamanan, privasi, dan efektivitas sistem elektronik. Dengan pengetahuan mendalam tentang tantangan dan peluang dalam penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan, inspektorat membantu dalam menciptakan lingkungan regulasi yang kondusif bagi inovasi dan pengembangan *e-government* yang berkelanjutan. Selain fungsi-fungsi tersebut, inspektorat juga turut serta dalam menyusun standar dan pedoman operasional untuk pengelolaan *e-government* dengan memastikan bahwa proses-proses yang terlibat dalam penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan terukur. Dengan demikian, inspektorat memegang peran sentral dalam menjaga integritas, keamanan, dan efektivitas sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dengan pengawasan yang cermat, tindakan preventif yang tepat.

Kolaborasi antara Diskominfo, Bappeda, dan Inspektorat sangat penting dalam menciptakan sistem *e-government* yang handal dan berkelanjutan. Diskominfo memastikan bahwa semua komponen teknologi berfungsi dengan baik, Bappeda menyediakan perencanaan strategis yang komprehensif, sementara Inspektorat menjaga integritas dan akuntabilitas pelaksanaan program. Sinergi ini

memungkinkan pemerintah daerah untuk memberikan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, keberhasilan *e-government* tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kerjasama dan koordinasi yang efektif antara berbagai aktor kunci. Diskominfo, Bappeda, dan Inspektorat adalah contoh bagaimana peran yang berbeda namun saling melengkapi dapat menghasilkan sistem pemerintahan yang lebih baik dan efisien. Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak ini, diharapkan *e-government* dapat membawa perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di pemerintahan daerah.

Berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, penilaian SPBE menentukan sejauh mana pencapaian kematangan penuh penyelenggaraan SPBE di tingkat pusat dan daerah. Petunjuk Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai instrumen yang digunakan dalam proses pemantauan dan evaluasi SPBE. Tujuan dari perangkat evaluasi yang tercantum dalam Pedoman adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang penyelenggaraan dan fungsi SPBE di berbagai lembaga pemerintah, baik nasional maupun daerah.

Struktur penilaian tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) didesain secara komprehensif untuk memastikan bahwa setiap elemen penting dalam implementasi SPBE diukur dengan tepat. Struktur ini terdiri atas tiga komponen utama: Domain, Aspek, dan Indikator.

Domain merupakan area penerapan SPBE yang dinilai secara umum, mencakup berbagai bidang yang relevan dalam penerapan teknologi dan digitalisasi pemerintahan. Dengan mengidentifikasi domain secara jelas, penilaian dapat difokuskan pada area-area kritis yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SPBE.

Selanjutnya di dalam setiap domain terdapat Aspek yang mewakili area spesifik dari penerapan SPBE. Aspek ini berfungsi untuk memecah domain menjadi bagian-bagian yang lebih detail, memungkinkan penilaian yang lebih mendalam dan terarah. Setiap aspek memberikan fokus pada elemen-elemen tertentu yang harus diperhatikan dan dikembangkan oleh instansi pemerintah. Dengan adanya aspek, penilaian dapat menggali lebih jauh mengenai bagaimana penerapan SPBE dilakukan dalam berbagai dimensi yang spesifik. Setiap aspek terdiri dari beberapa indikator yang dirancang untuk mengukur sejauh mana elemen-elemen tersebut telah diterapkan dengan baik. Indikator membantu dalam memberikan penilaian yang objektif dan terukur, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat kematangan penerapan SPBE. Dengan demikian, keseluruhan struktur penilaian ini memastikan bahwa setiap tahap dalam implementasi SPBE dapat diukur secara rinci, mulai dari tingkat domain hingga indikator terkecil, sehingga instansi pemerintah dapat terus meningkatkan kualitas penerapan SPBE. Keterangan lebih lanjut mengenai domain, aspek, dan indikator dalam struktur penilaian tingkat kematangan SPBE dapat dikategorikan sebagai berikut :

2.1.1 Domain Kebijakan SPBE

Domain Kebijakan Internal hanya terdiri dari satu Aspek yaitu Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE. Domain Kebijakan Internal dalam konteks sistem informasi berbasis elektronik merupakan landasan penting bagi organisasi atau institusi dalam mengelola proses dan sumber daya internal secara efektif. Dalam sistem yang semakin kompleks ini, keberadaan kebijakan internal sangat krusial untuk memastikan bahwa tata kelola teknologi informasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Kebijakan internal ini berperan sebagai pedoman yang mengarahkan bagaimana penggunaan teknologi dan informasi dilakukan, sehingga tercipta harmoni antara aspek teknis dan manajerial. Tata kelola yang baik mampu meminimalkan risiko serta meningkatkan efisiensi operasional.

Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola adalah satu-satunya aspek dalam domain ini yang secara khusus menekankan pada pengelolaan sistem dan data dengan pendekatan strategis. Tata kelola ini mencakup pembuatan aturan yang jelas terkait pengelolaan akses, pemeliharaan data, hingga penggunaan sistem informasi berbasis elektronik. Selain itu, kebijakan ini juga mengatur tanggung jawab tiap individu dalam menjalankan fungsinya dalam sistem tersebut. Dengan demikian, aspek tata kelola ini menjadi jembatan antara pengaturan teknis sistem informasi dan kebutuhan organisasi.

Pengimplementasian Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola bertujuan untuk menjamin integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan informasi dalam sistem elektronik. Setiap organisasi memerlukan tata kelola yang baik untuk menghindari

pelanggaran data, penyalahgunaan sistem, atau malfungsi teknis. Hal ini dicapai melalui pembagian wewenang yang jelas, serta pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ada. Di samping itu, kebijakan tata kelola yang efektif juga memfasilitasi penerapan standar keamanan dan privasi yang lebih tinggi.

Peran kebijakan tata kelola ini tidak hanya terbatas pada operasional teknis saja, namun juga mencakup aspek manajerial yang berhubungan dengan perencanaan strategis dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Tata kelola yang baik memastikan bahwa semua keputusan yang diambil dalam penggunaan sistem informasi berbasis elektronik didasarkan pada kebijakan yang telah disusun dengan matang. Hal ini memberikan kepastian bahwa pengelolaan data dan sumber daya informasi dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola dalam sistem informasi berbasis elektronik adalah faktor kunci yang menjamin keberlangsungan operasional yang aman dan efisien. Melalui kebijakan ini, organisasi dapat mengurangi risiko yang berkaitan dengan teknologi informasi sekaligus memastikan bahwa sistem yang ada berjalan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku. Dengan penerapan kebijakan internal yang baik, diharapkan setiap organisasi dapat lebih siap menghadapi tantangan yang muncul dari perkembangan teknologi informasi di masa depan.

2.1.2 Domain Tata Kelola SPBE

Pada Domain Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencakup tiga aspek utama yang berfungsi sebagai pilar bagi pengelolaan teknologi dan informasi dalam pemerintahan. Ketiga aspek tersebut adalah Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta Penyelenggara SPBE. Masing-masing aspek memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan melalui pemanfaatan teknologi digital. Tata kelola yang baik dalam ketiga aspek ini tidak hanya mendukung tercapainya tujuan pemerintah, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Aspek pertama, Perencanaan Strategis SPBE, berfokus pada penyusunan rencana jangka panjang dan menengah untuk pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Aspek ini mengintegrasikan kebutuhan pemerintah dan masyarakat dalam membangun infrastruktur digital yang tepat guna. Dalam perencanaan strategis, pemerintah menentukan arah kebijakan, tujuan, dan prioritas utama yang ingin dicapai melalui implementasi SPBE. Dengan adanya perencanaan yang matang, pemerintah dapat meminimalkan risiko kegagalan proyek teknologi, serta memastikan bahwa alokasi anggaran dan sumber daya lainnya tepat sasaran.

Aspek kedua, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), mencakup semua komponen teknis yang mendukung operasional SPBE. TIK meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta keamanan informasi yang diperlukan untuk memastikan kelancaran sistem elektronik dalam pemerintahan.

Pada aspek ini, pemilihan dan penerapan teknologi harus sesuai dengan standar keamanan dan kinerja yang tinggi untuk mencegah gangguan atau ancaman terhadap sistem. Pengelolaan TIK yang baik akan memperkuat fondasi teknis pemerintahan digital, sekaligus mendukung kelancaran penyampaian layanan kepada masyarakat.

Aspek ketiga, Penyelenggara SPBE, berfokus pada aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengawasan SPBE. Penyelenggara SPBE mencakup lembaga, unit, dan individu yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan SPBE di berbagai tingkatan pemerintahan. Mereka berperan dalam mengoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai komponen SPBE, memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan selaras dengan perencanaan strategis yang telah dibuat. Penyelenggara SPBE juga bertugas memantau dan mengevaluasi kinerja sistem, serta melakukan perbaikan berkelanjutan guna memastikan tercapainya target-target pemerintahan digital.

Tata Kelola SPBE adalah kerangka yang mengintegrasikan ketiga aspek ini untuk membangun pemerintahan yang modern dan responsif. Kolaborasi yang erat antara perencanaan strategis, teknologi informasi, dan penyelenggara SPBE sangat penting untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Dengan pengelolaan yang tepat, SPBE dapat berperan sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan transparansi pemerintahan, dan memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam menghadapi tantangan di era digital.

2.1.3 Domain Manajemen SPBE

Domain manajemen dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan sistem pendukung penting yang menjamin pengawasan, administrasi, dan pengendalian sistem yang bergantung pada teknologi yang mematuhi norma-norma yang telah ditetapkan sebelumnya. Terdapat dua bagian utama dalam domain ini: Aspek Pelaksanaan Manajemen SPBE dan Aspek Pelaksanaan Audit TIK. Masing-masing diperlukan untuk menjamin bahwa operasi elektronik pemerintah aman, terjamin, dan sesuai dengan teknologi dan proses yang digunakan.

Aspek Penerapan Manajemen SPBE adalah bagian yang mengatur bagaimana pengelolaan dan operasional SPBE dilakukan dalam lingkungan pemerintahan. Di dalam aspek ini, terdapat proses pengelolaan yang mencakup perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan sistem informasi berbasis elektronik. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap unit pemerintahan yang terlibat dalam SPBE memiliki mekanisme manajemen yang terstruktur, sehingga semua komponen sistem dapat berfungsi optimal. Manajemen yang baik juga mendorong adanya koordinasi yang lebih baik antar unit pemerintahan serta penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Manajemen SPBE juga melibatkan penerapan standar, prosedur, serta kebijakan yang memastikan keberlangsungan dan kehandalan sistem. Di bawah Aspek Penerapan Manajemen SPBE, pemerintah dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas implementasi teknologi dalam

mendukung pelayanan publik. Langkah-langkah ini sangat penting agar inisiatif digital pemerintah dapat terus diperbaiki dan dioptimalkan, sehingga tujuan SPBE dapat tercapai secara berkelanjutan.

Aspek Pelaksanaan Audit TIK berfokus pada evaluasi dan pengawasan terhadap infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang digunakan dalam SPBE. Audit TIK bertujuan untuk menilai apakah sistem teknologi yang digunakan sesuai dengan standar keamanan, integritas, dan kinerja yang telah ditentukan. Pelaksanaan audit ini juga membantu mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi, seperti pelanggaran keamanan, inefisiensi operasional, atau ketidakpatuhan terhadap regulasi. Dengan audit yang rutin, pemerintah dapat mengurangi risiko yang mungkin berdampak negatif terhadap layanan digital dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sistem.

Kedua aspek dalam Domain Manajemen SPBE berfungsi untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik berjalan dengan efisien dan aman. Melalui penerapan manajemen yang tepat dan pelaksanaan audit yang menyeluruh, pemerintah dapat memitigasi risiko, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memastikan bahwa teknologi yang digunakan dapat mendukung kinerja pemerintahan dengan optimal. Tata kelola yang baik dalam manajemen SPBE juga akan membantu pemerintah dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.1.4 Domain Layanan

Untuk meningkatkan efektivitas dan keandalan layanan publik, ranah layanan SPBE mencakup dua komponen penting. Ada dua bagian di dalamnya, yaitu layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang dilakukan secara daring. Keduanya penting untuk memastikan bahwa layanan masyarakat dan tugas administratif dilakukan dengan cepat, terbuka, dan bertanggung jawab melalui penggunaan TI.

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik berfokus pada digitalisasi proses internal pemerintahan. Aspek ini mencakup pengelolaan data, komunikasi antar unit pemerintahan, serta pengambilan keputusan yang dilakukan secara elektronik. Dengan adanya layanan ini, proses administrasi yang sebelumnya manual dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, mengurangi kesalahan manusia, serta meningkatkan akurasi dan keamanan data. Layanan administrasi berbasis elektronik juga mendukung transparansi dan akuntabilitas di dalam pemerintahan, memudahkan pengawasan dan audit terhadap aktivitas birokrasi.

Sementara itu, EBS difokuskan pada penyediaan layanan publik secara daring. Masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pemerintah untuk memanfaatkan layanan ini, yang memungkinkan mereka membayar pajak, mengajukan izin, dan menyerahkan dokumen secara elektronik. Hal ini menghemat waktu dan biaya bagi warga negara sekaligus mempercepat proses layanan. Instansi pemerintah dapat memenuhi tuntutan konstituennya dengan

lebih baik dan menyediakan layanan penting yang dapat diakses oleh semua tingkat pendapatan melalui penggunaan layanan publik berbasis elektronik.

Layanan pemerintah penunjang IPPD tercakup dalam Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sementara itu, layanan pemerintah yang ditawarkan melalui sarana elektronik adalah 30 Penyampaian layanan yang cepat dan efektif merupakan tujuan dari laporan publik tentang pelaksanaan evaluasi SPBE 2023. Berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, kriteria penilaian untuk Domain ini telah diperbarui. Standar baru tersebut memperhitungkan hubungan antara pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik (RB) dan Pusat Layanan Publik (MPP) digital, serta tingkat kematangan indikator Layanan Publik untuk Sektor 1-3. Namun, Domain Layanan tetap mengungguli semua Domain lainnya dalam hal nilai indeks Domain rata-rata, bahkan setelah modifikasi ini..

Kota Tegal juga turut serta dalam penerapan penilaian ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik berbasis elektronik. Pada tahun 2022 Kota Tegal menargetkan peningkatan signifikan dalam manajemen dan audit dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*). Fokus ini diambil karena berdasarkan evaluasi sebelumnya, indikator manajemen dan audit di Kota Tegal masih tertinggal cukup jauh dibandingkan dengan indikator lainnya, dengan nilai yang hanya mencapai angka 1. Nilai ini menunjukkan bahwa masih banyak aspek yang perlu diperbaiki agar

sistem *e-government* dapat berfungsi secara optimal dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Salah satu langkah utama yang akan diambil adalah memperkuat kapasitas manajemen proyek dan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan *e-government*. Pemerintah Kota Tegal akan menyediakan pelatihan intensif bagi pegawai di berbagai departemen, khususnya yang berhubungan langsung dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, sehingga mereka mampu mengelola proyek *e-government* dengan lebih efektif dan efisien.

Tabel 2.2
Indeks SPBE Pemerintah Daerah di Wilayah Jawa Tengah Tahun 2022

Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	3.30	2.60	2.82	3.94	3.34	Baik
Pemerintah Kab. Semarang	2.00	1.60	1.00	2.86	2.13	Cukup
Pemerintah Kab. Kendal	3.00	2.80	1.27	3.57	2.93	Baik
Pemerintah Kab. Demak	3.50	3.10	1.36	3.82	3.19*	Baik
Pemerintah Kab. Grobogan	4.00	3.20	1.55	3.94	3.37	Baik
Pemerintah Kab. Pekalongan	2.80	2.20	1.36	3.25	2.62	Baik
Pemerintah Kab. Batang	2.50	2.40	1.00	3.87	2.85	Baik
Pemerintah Kab. Tegal	3.50	2.50	1.73	3.81	3.10	Baik
Pemerintah Kab. Brebes	1.90	1.60	1.00	3.50	2.40	Cukup
Pemerintah Kab. Pati	2.80	2.30	1.00	3.62	2.75*	Baik
Pemerintah Kab. Kudus	3.90	3.00	2.36	3.82	3.38	Baik
Pemerintah Kab. Pemalang	2.20	2.20	1.00	2.70	2.23	Cukup
Pemerintah Kab. Jepara	3.80	2.60	1.73	3.76	3.14	Baik
Pemerintah Kab. Rembang	3.40	2.70	2.55	3.63	3.19	Baik
Pemerintah Kab. Blora	1.70	1.70	1.00	3.46	2.38	Cukup
Pemerintah Kab. Banyumas	3.00	1.90	1.00	3.45	2.60	Baik
Pemerintah Kab. Cilacap	4.30	2.10	1.00	3.56	2.87	Baik
Pemerintah Kab.	3.20	2.80	2.64	3.69	3.23	Baik

Purbalingga						
Pemerintah Kab. Banjarnegara	4.20	2.40	1.55	3.20	2.86	Baik
Pemerintah Kab. Magelang	4.90	2.40	1.09	3.76	3.13	Baik
Pemerintah Kab. Temanggung	2.70	2.50	1.27	3.50	2.78*	Baik
Pemerintah Kab. Wonosobo	2.90	2.20	1.45	3.81	2.90	Baik
Pemerintah Kab. Purworejo	2.00	2.50	1.73	3.57	2.80	Baik
Pemerintah Kab. Kebumen	3.30	3.40	1.00	4.39	3.44	Baik
Pemerintah Kab. Klaten	3.20	2.70	1.00	3.25	2.74*	Baik
Pemerintah Kab. Boyolali	3.20	2.70	1.00	3.43	2.82*	Baik
Pemerintah Kab. Sragen	3.10	2.40	2.00	3.93	3.12	Baik
Pemerintah Kab. Sukoharjo	4.00	2.70	2.45	4.01	3.42	Baik
Pemerintah Kab. Karanganyar	3.90	3.90	3.10	1.64	3.32	Baik
Pemerintah Kab. Wonogiri	2.40	3.40	1.27	4.33	3.34	Baik
Pemerintah Kota Semarang	5.00	3.30	2.64	3.23	3.38	Baik
Pemerintah Kota Salatiga	2.30	3.00	1.00	3.63	2.86	Baik
Pemerintah Kota Pekalongan	2.80	2.10	1.36	3.75	2.82*	Baik
Pemerintah Kota Tegal	4.20	2.60	1.00	3.70	3.05	Baik
Pemerintah Kota Magelang	2.50	3.00	1.27	3.04	2.67	Baik
Pemerintah Kota Surakarta	5.00	3.00	2.36	4.31	3.75	Sangat Baik

Sumber : Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE (2022).

Perbandingan perolehan nilai indeks Pemerintahan Kota Tegal pada domain Kebijakan SPBE meraih peringkat ke empat yaitu mendapatkan nilai 4.20 dengan perolehan nilai tersebut maka setara dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Setelah itu, dari segi tata kelola, SPBE menduduki peringkat enam, berbagi kehormatan dengan pemerintah Jawa Tengah dan Kabupaten Jepara (keduanya mendapat nilai 2,60). Dari segi pengelolaan, SPBE Kota Tegal

menduduki peringkat terakhir dengan nilai 1,00 berbagi dengan kabupaten berikut: Semarang, Batang, Brebes, Pati, Pemalang, Blora, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Klaten, Boyolali, Salatiga, dan Tegal. Sedangkan pada domain layanan SPBE Kota Tegal meraih peringkat sepuluh yaitu mendapatkan nilai 3.70 bersama dengan Pemerintah Kabupaten Brebes. Berikut hasil Pemantauan dan evaluasi SPBE Kota Tegal tahun 2022 :

Tabel 2.3
Hasil Evaluasi SPBE Kota Tegal Tahun 2022

Nama Indeks	Nilai 2022
SPBE	3,05
Domain Kebijakan SPBE	4,20
Domain Tata Kelola SPBE	2,60
Domain Manajemen SPBE	1,00
Domain Layanan SPBE	3,70

Sumber : Hasil Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kota Tegal (2022)

Dari data tabel di atas terlihat bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik Kota Tegal memperoleh skor penilaian yang tinggi yaitu 3,05 dan predikat baik. Hal ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu tiga tahun Kota Tegal mengalami peningkatan skor indeks yang signifikan; pada tahun 2021 sebesar 2,39 dengan predikat cukup, pada tahun 2022 sebesar 3,05 dengan predikat baik, dan pada tahun 2023 sebesar 4,67 dengan predikat sangat baik. Dengan peningkatan dari tahun ke tahun, pertumbuhan yang paling terlihat adalah pada bidang manajemen dan tata kelola yang masing-masing akan mengalami peningkatan sebesar 1,64 dan 1,00 persen dari tahun 2022 ke tahun 2023.. Berikut lebih lanjut perolehan nilai tingkat kematangan pada setiap indikator pada hasil pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun 2023.

Tabel 2.4
Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator SPBE Kota Tegal Tahun 2022

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2022
1.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah	3
2.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah	3
3.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5
4.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5
5.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5
6.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	5
7.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	3
8.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5
9.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah	5
11.	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah	1
12.	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah	1
13.	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14.	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15.	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16.	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	4
17.	Tingkat Kematangan Layanan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	3
18.	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2
19.	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	4
20.	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	4
21.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen SPBE	1
22.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25.	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber	1

	Daya Manusia	
26.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29.	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30.	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31.	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32.	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33.	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34.	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35.	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36.	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	3
37.	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	3
38.	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah	3
39.	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	1
40.	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41.	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	5
42.	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43.	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2
44.	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45.	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46.	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47.	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5

Sumber : Hasil Laporan Pemantauan dan Evaluasi SPBE di Kota Tegal (2022)

Hasil evaluasi dan pemantauan sistem pemerintahan berbasis elektronik Kota Tegal tahun 2022, salah satu indikator yang mendapatkan nilai sempurna adalah Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan internal yang berkaitan dengan manajemen data telah diterapkan secara optimal, memungkinkan pengelolaan data yang lebih terstruktur, aman, dan dapat diandalkan. Selain itu, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE juga menunjukkan hasil yang

memuaskan, dengan semua proses pembangunan aplikasi sudah mengikuti standar yang ditetapkan dan mendukung integrasi layanan pemerintahan berbasis digital. Bukan hanya itu, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data dan Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi juga mencapai nilai indeks sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi informasi di berbagai instansi sudah sangat matang, dengan pusat data yang handal dan jaringan intra instansi yang terjamin keamanannya. Hasil ini mencerminkan keberhasilan dalam penguatan kebijakan dan implementasi SPBE, yang pada gilirannya mendukung peningkatan pelayanan publik secara keseluruhan.

Meskipun demikian meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa aspek, ada beberapa indikator yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam kategori audit dan manajemen. Salah satu indikator yang mencatat perolehan nilai indeks yang rendah adalah Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah. Nilai rendah ini menunjukkan bahwa arsitektur SPBE belum sepenuhnya terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik, sehingga memerlukan perhatian lebih untuk memastikan bahwa semua komponen SPBE dapat berfungsi secara sinergis dan efisien. Selain itu, Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah juga mencatat nilai indeks yang rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa peta rencana yang seharusnya menjadi panduan strategis dalam implementasi SPBE masih memerlukan penyempurnaan. Peta rencana yang ada mungkin belum sepenuhnya komprehensif atau kurang dalam pelaksanaannya, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas keseluruhan

program SPBE. Sehingga perlu adanya revisi dan pembaruan peta rencana yang lebih detail dan realistis, serta dukungan implementasi yang lebih kuat. Kedua indikator ini menyoroti pentingnya penguatan dalam aspek perencanaan dan manajemen strategis SPBE. Evaluasi ini menjadi dasar untuk mendorong upaya perbaikan yang lebih terarah, agar SPBE dapat mencapai tingkat kematangan yang diharapkan dan mampu mendukung transformasi digital pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Pemerintah perlu memastikan bahwa arsitektur SPBE dan peta rencana yang ada disusun dan diimplementasikan dengan baik, agar seluruh instansi dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Indikator kematangan skala 4 dijabarkan ke dalam domain berikut: tingkat kematangan layanan pusat data, tingkat kematangan tim koordinasi SPBE instansi pusat/daerah, tingkat kematangan kolaborasi penyelenggaraan SPBE, tingkat kematangan layanan berikut: perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan, pengaduan pelayanan publik, dokumentasi hukum, dan jaringan informasi. Kesepuluh indikasi yang membentuk skala tingkat kematangan 3 masing-masing termasuk dalam salah satu kategori berikut: tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE instansi pusat/daerah, tingkat kematangan kebijakan internal peta rencana SPBE instansi pusat/daerah, serta topik terkait lainnya. Penilaian Kematangan Kebijakan TI Internal, Tingkat Kematangan Anggaran dan Rencana SPBE, Tingkat Pengembangan Aplikasi SPBE, Tingkat Kematangan Layanan Intra-Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Layanan berikut telah mencapai tingkat kematangan tertentu: layanan kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik negara/daerah, dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Terdapat dua indikasi yang membentuk skala kematangan tingkat kedua, yaitu tingkat kematangan layanan data terbuka dan jumlah pemanfaatan sistem penghubung layanan instansi. Selain itu, Peta Rencana SPBE dan Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah merupakan ranah yang membentuk skala kematangan tingkat pertama. Tingkat Kematangan Instansi Pemerintah, Tingkat Kematangan Manajemen SPBE, Tingkat Kematangan Manajemen Keamanan Informasi SPBE, Tingkat Kematangan Manajemen Data SPBE, Tingkat Kematangan Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE, Tingkat Kematangan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE, Tingkat Kematangan Manajemen Pengetahuan SPBE, Tingkat Kematangan Manajemen Perubahan SPBE, Tingkat Kematangan Manajemen Layanan SPBE, Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur SPBE, Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE, Tingkat Kematangan Audit Keamanan SPBE, dan Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah.

Selain itu, Kota Tegal akan memperkuat sistem audit internal untuk memastikan bahwa setiap proses dalam implementasi *e-government* berjalan sesuai dengan standar dan regulasi yang telah ditetapkan. Inspektorat akan memainkan peran penting dalam melakukan audit berkala dan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Pengawasan yang ketat ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi penyimpangan sejak dini, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Dalam rangka mencapai target peningkatan manajemen dan audit, Kota Tegal juga akan berkolaborasi dengan pihak eksternal seperti lembaga konsultasi dan universitas yang memiliki keahlian di bidang *e-government*. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan yang ada. Melalui kerja sama yang erat antara pemerintah, akademisi, dan praktisi, Kota Tegal dapat mempercepat proses perbaikan dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Dengan fokus pada peningkatan manajemen dan audit, Kota Tegal berkomitmen untuk memperbaiki sistem *e-government* demi memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Langkah-langkah strategis yang diambil pada tahun 2023 diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai indikator yang masih rendah, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pengembangan *e-government* di masa depan. Dengan demikian, Kota Tegal dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif dan efisien.

2.2 Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2022

Dengan menggunakan analisis SWOT, yang menunjukkan bahwa elemen internal dan eksternal dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan dan bisnis, kita dapat memahami bagaimana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2022 akan dievaluasi. Analisis SWOT melihat elemen internal dan eksternal, membandingkan yang pertama dengan yang terakhir. Tak satu pun dari hal-hal ini dapat diabaikan dalam analisis SWOT. Salah satu kemungkinan penggunaan temuan analisis SWOT adalah untuk mengusulkan pendekatan yang berbeda

terhadap pembuatan kebijakan dan administrasi publik. Ide segar yang memperbarui banyak pilihan yang telah diputuskan sebelumnya mungkin adalah saran baru ini. Dalam nada yang sama, ide alternatif berpotensi untuk mengubah tujuan, taktik, dan sasaran legislatif atau pemerintah di masa mendatang. Untuk menentukan kelayakan kebijakan atau rencana manajemen sebelum menerapkannya, seseorang dapat menggunakan analisis SWOT untuk melihat kondisi kebijakan saat ini serta situasi pemerintah potensial di masa mendatang. Selain melakukannya sebelum suatu kebijakan diterapkan, analisis SWOT dapat digunakan untuk menentukan apakah kebijakan tersebut harus dipertahankan, difokuskan kembali, atau dibatalkan sepenuhnya..

2.2.1 Kekuatan (*Strenghts*)

Jika pemerintah serius dengan e-government, daripada sekadar mengikuti tren, kebutuhan pertama dan terpenting adalah bahwa otoritas publik dan politik memiliki kemauan (niat) untuk benar-benar melaksanakan gagasan tersebut. Beberapa proyek pembangunan dan e-government akan gagal terwujud jika tidak ada "political will" dari pihak pemerintah.. Selaras dengan pernyataan dari Heru yang menyatakan:

“Untuk pemenuhan infrastruktur IT sudah baik, lalu dari kebijakan juga sudah mulai dijalankan walaupun belum semuanya misalkan pada manajemen resiko masih tertinggal, sehingga masih perlahan berproses belum semuanya baik. Setiap domain ada bobotnya masing-masing karena perhitungannya berbeda.” (Wawancara dengan Heru selaku pegawai Bappeda 26 April 2024)

Berdasarkan dari pernyataan – pernyataan diatas yang disampaikan oleh pegawai organisasi perangkat daerah yang turut berkoordinasi dalam implementasi dan pengawasan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota

Tegal dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kekuatan SPBE yang menjadi dukungan untuk dapat ditingkatkan diantaranya:

- (1) Khusus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal, keberadaan staf yang terlatih, berpengalaman, dan berdedikasi tinggi menjadi hal yang mutlak diperlukan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal memiliki satu bagian, yaitu bagian e-government, dan tentu saja tim pelaksana yang dibantu oleh lintas sektor di setiap perangkat daerah yang secara menyeluruh menangani pelaksanaan SPBE.
- (2) Memperlakukan kerangka e-government dengan tingkat kepentingan yang sama dengan faktor-faktor keberhasilan lainnya merupakan hal yang mutlak diperlukan jika negara ingin mewujudkan visi dan memenuhi tujuannya. Setiap tahun, peta rencana SPBE dibuat dengan tujuan untuk memfokuskan pada sasaran yang ingin dicapai.. Pada tahun 2024 ini SPBE Kota Tegal berfokus meningkatkan pada domain manajemen yang masih menjadi kekhawatiran karena nilai indek yang masih cukup rendah dibandingkan tiga domain yang lainnya. Dengan disepakatinya kerangka tersebut secara bersama, maka tingkat resistensi dimungkinkan akan kecil.
- (3) Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral. Meskipun tidak semuanya organisasi perangkat daerah memiliki tenaga kerja atau pegawai yang mumpuni dalam hal ini yang mampu mengoperasikan teknologi digital

namun bukan menjadi hambatan sejauh ini karena Dinas Komunikasi dan Informatika akan berkoordinasi dan bersedia membantu secara penuh.

- (4) Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktural pendukung agar terciptanya lingkungan kondusif untuk mengembangkan *e-government*. Terbukti dari terpenuhinya jaringan internet yang hampir merata di seluruh cakupan wilayah Kota Tegal bukan hanya antar organisasi perangkat daerah, melainkan sampai pada level kelurahan dan puskesmas serta pada ruang publik seperti taman.
- (5) Disosialisasikannya konsep *e-government* secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seuruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai kampanye yang simpatik. Dalam implementasi dan pengawasan keberjalanan SPBE pada setiap tahunnya tentu melewati sosialisasi dalam hal ini adalah dilaksanakannya rapat yang dihadiri oleh tim pelaksana SPBE pada setiap tahunnya untuk membahas tujuan apa yang ingin dicapai dan nilai indeks apa saja yang masih menjadi prioritas untuk terus dapat ditingkatkan.

2.2.2 Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan merupakan kendala yang menyebabkan pemerintah tidak dapat memenuhi tuntutan masyarakat secara memadai karena kurangnya sumber daya atau kompetensi yang tidak memadai. Kenyataannya, kekurangan ini terlihat dalam beberapa hal berikut: kemampuan manajemen yang tidak memadai; keterampilan tata kelola yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; pengoperasian produk yang tidak efektif, sehingga tidak dapat memenuhi

kebutuhan masyarakat; dan, terakhir, tidak adanya manfaat yang memadai secara berkelanjutan. Selaras dengan pernyataan dari Fahmi yang menyatakan:

“Pada indikator khususnya di manajemen meskipun tahun ini sudah melakukan kita belajar dengan lembaga yang point manajemennya tinggi dalam hal ini kementerian pertanian, kemudian kita dapat inspirasi dan kita akan mengimplementasikan esensi yang sama dengan tools yang beda di tahun ini. Esensi dari penilaian SPBE kan ada kekurangan di perbaiki dan tidak sembarang membuat tools saja tetapi kita harus menyiapkan orangnya dan melatih, manajemen SPBE kan terdiri dari ada ajuan hostay, ajuan jaringan, ajuan hotspot, gangguan jaringan itu selama ini sudah kita lakukan artinya esensinya sudah berjalan makanya segala sesuatunya normal lancar tetapi manajemen SPBE menginginkan harus ada tools maka dari itu yang saya kejar esensi dan sedang berusaha sekali mengejar jadi yang keluar ya itu sejatinya ada dulu aplikasinya belakangan isinya untuk mempersiapkan itu tidak mungkin waktu yang sebentar 1 atau 2 bulan bisa berbulan-bulan.” (Wawancara dengan Fahmi selaku pegawai Diskominfo bagian e-gov pada 5 April 2024)

Berdasarkan dari pernyataan – pernyataan diatas yang disampaikan oleh pegawai organisasi perangkat daerah yang turut berkoordinasi dalam implementasi dan pengawasan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Tegal dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kelemahan yang masih menjadi hambatan dalam implementasi SPBE diantaranya :

- (1) Belum meratanya sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan teknologi digital pada setiap organisasi perangkat daerah. Meskipun sarana dan prasarana sudah memenuhi seperti ketersediaan komputer bagi setiap pegawai di lintas sektoral organisasi perangkat daerah.
- (2) Meskipun untuk jaringan internet sudah sangat memadai namun dalam SPBE tetapi pada domain manajemen SPBE menginginkan harus terdapat tools, oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal dan tim pelaksana SPBE masih terus berupaya untuk meningkatkan hal itu.

- (3) Belum terpenuhinya sumber daya finansial secara penuh dan sesuai kebutuhan yang diperlukan.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Tegal mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai Rp1,09 triliun untuk pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan nilai sekitar Rp218 miliar, investasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik serta memperkuat infrastruktur digital di berbagai sektor pemerintahan. Alokasi tersebut akan mencakup pengembangan teknologi informasi, penyediaan layanan berbasis daring, serta penguatan keamanan data untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih modern.

Fokus utama dari alokasi anggaran ini adalah memperkuat kapasitas layanan digital melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal. Program-program utama seperti digitalisasi layanan administrasi, pengelolaan data secara terintegrasi, dan aplikasi pelayanan publik akan dikembangkan lebih lanjut. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses birokrasi, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, serta meningkatkan aksesibilitas layanan kepada masyarakat. Dengan pengalokasian anggaran yang signifikan ini, Kota Tegal menargetkan terwujudnya pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Pemerintah optimistis bahwa transformasi digital melalui SPBE akan mendukung visi Kota Tegal sebagai kota yang inovatif dan adaptif

terhadap perkembangan teknologi, demi meningkatkan kualitas hidup warganya.

Dalam pengelolaan anggaran bulanan, jika 20 persen dari total anggaran Kota Tegal sebesar Rp1.085.069.119.000 dialokasikan, maka jumlah yang tersedia untuk setiap bulan mencapai Rp18.084.485.316. Alokasi ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan operasional yang mendukung kegiatan pemerintahan, seperti belanja pegawai, pemeliharaan infrastruktur, serta pengelolaan layanan publik yang lebih efisien. Dengan anggaran sebesar itu pada setiap bulannya pemerintah Kota Tegal memiliki kesempatan untuk mendukung program-program prioritas, termasuk di dalamnya adalah pelayanan publik berbasis digital melalui SPBE, serta sektor lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Pembagian anggaran yang efektif memastikan bahwa seluruh kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, terutama dalam hal layanan yang cepat dan tepat sasaran. Manajemen anggaran yang efisien dengan alokasi 20 persen ini juga memungkinkan pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan daerah. Ini penting untuk memastikan bahwa program-program pembangunan jangka panjang tetap dapat berjalan tanpa gangguan finansial, sekaligus memperkuat posisi fiskal Kota Tegal agar dapat bertahan di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Gambar 2.1
Ringkasan Jumlah APBD Kota Tegal Tahun 2022

Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kota Tegal
Nomor : 11 Tahun 2021
Tanggal : 28 Desember 2021

KOTA TEGAL RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022		
Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	874.211.813.000
4.1.01	Pajak Daerah	116.462.288.000
4.1.02	Retribusi Daerah	40.748.670.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.913.847.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	304.080.008.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	710.857.306.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	641.781.717.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	69.075.589.000
	Jumlah Pendapatan	1.085.069.119.000
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	979.991.614.659
5.1.01	Belanja Pegawai	482.543.892.164
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	466.414.803.829
5.1.05	Belanja Hibah	22.579.958.474
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.435.000.000
5.2	BELANJA MODAL	163.683.976.547
5.2.01	Belanja Modal Tanah	38.618.585.000
5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	29.891.252.642
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.376.117.675
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	42.531.719.230
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.886.308.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	21.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	21.000.000.000
	Jumlah Belanja	1.164.677.681.206
	Total Surplus/(Defisit)	(79.608.562.206)
6	PEMBAYARAN	
6.1	PEMERIKSAAN PEMBIAYAAN	92.614.512.206
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	92.614.512.206
	Jumlah Pemeriksaan Pembiayaan	92.614.512.206
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.006.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	11.006.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11.006.000.000
	Pembiayaan Netto	79.608.512.206
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berikutan	0


 DEDY KURNI SUPRIYONO

Sumber : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Tegal (2022)

- (4) Masih kurangnya political will dan political action yang menunjang keberjalanan optimalisasi SPBE di Kota Tegal.

2.2.3 Peluang (*Opportunities*)

Peluang menghalangi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada tingkat yang tepat karena kompetensi atau sumber daya yang tidak memadai.

Sayangnya, kekurangan ini terwujud dalam cara-cara berikut: pengoperasian produk yang tidak efektif, yang menghalanginya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; kemampuan manajemen yang tidak memadai; keterampilan tata kelola yang tidak mematuhi peraturan yang relevan; dan, terakhir, kurangnya manfaat yang memadai secara berkelanjutan. Selaras dengan pernyataan dari Fahmi yang menyatakan:

“Jika ada peluang kita akan kejar, contohnya SIMWAS tadinya mendapat point 1 memungkinkan dapat 3 kita kejar karena kebijakannya mengamanatkan mau reaplikasi kesana dan bapak inspektornya datang sendiri kesana makanya dapat, selain itu ada SPLP atau sistem penghubung layanan pemerintahan di Diskominfo, dari 2 rencana itu jika bisa berjalan lancar bisa mengoptimalkan ke level memuaskan pada assegment.” (Wawancara dengan Fahmi selaku pegawai Diskominfo bagian *e-gov* pada 5 April 2024)

Berdasarkan dari pernyataan – pernyataan diatas yang disampaikan oleh pegawai organisasi perangkat daerah yang turut berkoordinasi dalam implementasi dan pengawasan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Tegal dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa peluang SPBE yang dapat ditingkatkan diantaranya :

- (1) Dana yang memadai untuk meluncurkan serangkaian program e-government; khususnya, Pemerintah Kota Tegal terbuka terhadap usulan tentang potensi peningkatan anggaran SPBE. Dengan demikian, dana selama ini cukup, sementara terkadang terjadi kekurangan karena perlu didistribusikan secara merata ke beberapa OPD di bawah Dinas Komunikasi dan Informasi.

(2) Memiliki infrastruktur TI yang memadai adalah separuh dari perjuangan untuk berhasil menerapkan e-government.

(3) Sekelompok kandidat yang memenuhi syarat dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menerapkan e-government dengan cara yang memaksimalkan keuntungan yang diharapkan.

2.2.4 Ancaman (*Threats*)

Kelemahan merupakan masalah ketika kelompok aparatur daerah tidak memiliki sumber daya atau tidak memiliki kemampuan untuk melayani kebutuhan masyarakat mereka seefektif mungkin. Kenyataannya, kekurangan ini terlihat jelas dalam bidang-bidang berikut: kemampuan manajemen yang tidak memadai; keterampilan sumber daya manusia yang tidak memenuhi persyaratan peraturan; operasi produk yang tidak efisien yang gagal memenuhi kebutuhan masyarakat; dan tingkat manfaat yang tidak memadai.. Selaras dengan pernyataan dari Heru yang menyatakan:

“Ancaman di bidang IT yaitu website OPD maupun Pemkot menjadi sasaran empuk bagi para hacker, dari bulan kemarin saja ada beberapa si yang udah kena hacker.” (Wawancara dengan Heru selaku pegawai Bappeda 5 April 2024)

Berdasarkan dari pernyataan – pernyataan diatas yang disampaikan oleh pegawai organisasi perangkat daerah yang turut berkoordinasi dalam implementasi dan pengawasan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Tegal dapat disimpulkan bahwa terdapat ancaman SPBE yang masih menjadi perhatian diantaranya :

(1) Ancaman di bidang IT yaitu *website* organisasi perangkat daerah maupun Pemerintah Kota menjadi sasaran empuk bagi para *hacker*, terbukti dari bulan kemarin saja terdapat beberapa organisasi perangkat daerah yang sudah kena *hacker*. Oleh karena itu pada bulan januari atau februari diskominfo mengadakan pelatihan keamanan *cyber* untuk pegawai di masing-masing organisasi perangkat daerah agar bisa mengamankan *website* yang dijalankan oleh BPKSDM.